

KONTESTASI NASIONALISME PAPUA DAN NASIONALISME INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH ORDE BARU

OLEH: BERNARDA METERAY

(Dosen Universitas Cenderawasih)

Seminar Akhir Tahun

**“INTEGRASI SOSIAL EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL
POLITIK PAPUA KE INDONESIA: TINJAUAN AKADEMIK”**

Kamis, 18 Desember 2014 | Pkl. 09.00-16.00 WIB, Auditorium LIPI, Lt.2 - Jakarta

Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik dengan Jaringan Damai Papua (JDP)



Kontestasi nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru

Oleh: Bernarda Meteray¹

Pendahuluan

Menjadi Indonesia dewasa ini bagi masyarakat yang sangat beragam baik suku, budaya, agama, bahasa, geografi, pendidikan maupun ekonomi bukanlah merupakan suatu kebanggaan semata-mata dan bukan pula sesuatu yang “ mudah”. Kesadaran sebagai masyarakat Indonesia baik di “pusat maupun daerah” dewasa ini masih bermasalah. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini di berbagai daerah di Indonesia seperti lemahnya penegakkan hukum, konflik antar partai, korupsi yang merajalela, tawuran antarpelajar dan kampung, kekerasan dalam keluarga dan sekolah, narkoba, intoleransi dalam beragama, ancaman teroris, dan masih adanya gerakan pemisahan diri di beberapa daerah di Indonesia.

Kondisi di atas ini memperlihatkan bahwa hingga dewasa ini kesadaran menjadi bangsa Indonesia di antara masyarakatnya belum menjadi bagian yang penting dalam hidup bernegara. Kondisi ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan Soekarno pada akhir perjuangan merebut kemerdekaan. Soekarno menyatakan bahwa “penting untuk disimak bahwa gagasan Indonesia, dengan segala keragamannya, belum mendapat “rumah yang nyaman” dalam negara Indonesia yang dibangun (Elson, 2008). Dengan demikian, pernyataan Soekarno ini mengindikasikan bahwa menjadi Indonesia dalam konteks negara-bangsa Indonesia, sebenarnya belum mencapai final karena proses membentuk identitas diri sebagai orang Indonesia masih dalam proses.

Namun ketika di Papua dilanda konflik, “keindonesiaan orang Papua sering dipertanyakan.” Kondisi ini pernah diungkapkan Manuel Kaisiepo dan Neles Tebay yang mempertanyakan mengapa setelah integrasi dengan Indonesia pada 1 Mei 1963 masih muncul OPM (Organisasi Papua Merdeka) pada 1965 dan hingga kini walaupun eksistensi OPM tidak berarti secara politik dan lebih-lebih secara militer, gerakan-gerakan itu masih ada² bahkan berbagai aksi mahasiswa yang mengibarkan bendera Kejora dan bukan Merah Putih di berbagai tempat seperti di Denpasar, Jogja dan Jakarta. Berbagai kejadian yang terjadi ini di Papua membuktikan bahwa masih rendahnya nasionalisme Indonesia di hati orang Papua.³ Morin juga mempertanyakan mengapa sejak integrasi 1963 hingga dewasa ini pohon keindonesiaan tidak tumbuh di antara orang Papua.⁴ Tim LIPI pada 2007 juga masih mempertanyakan mengapa sudah 62 tahun Indonesia merdeka, nasionalisme Indonesia di Papua mulai dipertanyakan kembali? (Soewarsono, ed.:2007). Pertanyaan-pertanyaan ini ternyata masih relevan dengan pertemuan hari ini yang barangkali masih mempersoalkan nasionalisme Indonesia di antara orang Papua. Oleh sebab itu makalah ini bertujuan memperlihatkan

¹ Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Cenderawasih, Papua

² Manuel Kaisiepo, “ke-irian-an dan Ke-indonesia-an: Mengkaji Nasionalisme dalam konteks Lokal”, dalam *Bina Darma*. No.44 tahun ke 12, 1994. Hlm. 50-51. Lihat pula Frans Maniagasi dalam “Masa Depan Papua Merdeka, otonomi Khusus dan Dialog” yang juga menanyakan mempersoalkan keindonesiaan di Papua dengan menyatakan bahwa mengapa rakyat Papua semakin “hilang’ rasa nasionalisme dan kebanggaannya sebagai orang Indonesia”? hlm. 147.

³ Neles Tebay, Nasionalisme Indonesia di Papua, dalam *Tabloid Fajar Timur*, Edisi III/Tahun 1/23-31 Agustus 2009, hlm. 1.

⁴ I.P. Morin (wawancara, 2008, Oktober 8).

bagaimana nasionalisme Papua dan Indonesia disemai, bertumbuh dan sebelum dan sesudah Orde Baru di Papua.

Makna Nama Indonesia

Menurut Elson (2008), sebelum abad kedua puluh, Indonesia belum ada dan karena itu orang “Indonesia” itu belum ada. Yang ada bukanlah satu bendera, melainkan banyak bendera.” Bahkan Elson menandakan pula bahwa di kepulauan ini tidak ada kepemimpinan pribumi yang dirumuskan secara luas, modern dan tegas. Bambang Purwanto (2008) dengan tegas mengatakan bahwa sebagai ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad XX, serta mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 1945. Sejak saat itu semua penduduk yang ada di bekas wilayah Hindia Belanda menyebut diri mereka sebagai bangsa Indonesia.

Menurut Elson (2008), kata Indonesia pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk Indu-nesians oleh pelancong dan pengamat sosial asal Inggris George Samuel Windsor Earl. Sementara James Logan merupakan orang pertama yang menggunakan nama “Indonesia.” Kemudian pada 1877, E.T. Hamy antropologi asal Perancis menggunakan kata Indonesia untuk menjabarkan kelompok-kelompok ras prasejarah dan pra-Melayu di kepulauan Indonesia. Kemudian berbagai orang dengan berbagai kepentingan mulai menggunakan kata Indonesia ketika mendeskripsikan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia.

Di Indonesia, khususnya Jawa merupakan tempat awal orang Indonesia mulai membicarakan masalah “keindonesiaan.” Pemikiran Soewardi Soeryaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker mulai menggagas keindonesiaan dalam “Indische partij.” Menurut Soewardi salah satu pendiri Indische partij (IP), yang namanya “orang Indonesia” adalah siapapun yang menganggap Hindia atau Indonesia sebagai tanah airnya, tanpa peduli apakah dia orang Indonesia totok, atau keturunan Tionghoa, Belanda, Eropa. Ternyata pemikiran untuk menjadi Indonesia terus bergulir dari tahun ke tahun namun baru dimulai pertama kali digunakan di kalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1922. Para pengagasnya antara lain Mohamad Hatta, Natsir, Achmad Soebardjo dan Soekiman Wirjosandjojo. Ide tentang keindonesiaan ini kemudian diwujudkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan kesadaran berbangsa Indonesia sebagai satu bangsa semakin kuat ketika bangsa Indonesia menjadi suatu *nation-state* pada peristiwa “Proklamasi 17 Agustus 1945”.

Pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tetapi merupakan suatu penemuan atau sesuatu yang diciptakan. Lihat kajian Wang Gungwu (dalam Suryadinata Leo, ed 2004) yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa adalah sebuah proses yang diciptakan/dibuat. Ketika menyinggung Persatuan Indonesia, Magnis-Sueno mengacu pada pemikiran Sukarno bahwa kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah melainkan melalui proses sejarah (dalam Lanur, Aleks1995).

Awal penyemaian nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia

Di Papua, kesadaran keindonesiaan muncul ketika kesadaran kepapuaan sudah bersemi, tumbuh secara perlahan dan melalui proses yang panjang (Meteray: 2012). Kajian ini menunjukkan bahwa kesadaran kepapuaan di Papua lebih kuat daripada keindonesiaan di akhir 1962.

Munculnya ide kepapuaan berawal ketika Isak Samuel Kijne seorang guru asal Belanda berinisiatif memindahkan sekolah dari Mansinam ke Mie⁵ pada 1925. Dasar pemindahan ini adalah untuk mendorong anak-anak Papua dapat berkembang sesuai dengan kondisinya sehingga tidak merasa minder dalam proses pembelajaran agar kelak mereka mampu memimpin masyarakat dan daerahnya sendiri. Selama itu di Mansinam, pendidikan yang dilangsungkan di Mansinam melibatkan murid-murid asal Ambon, Sangir dan keturunan Cina yang lebih banyak mendominasi berbagai aktifitas di sekolah daripada anak Papua. Faktor inilah yang menjadi pendorong dibukanya sekolah di Mie.

Konsekuensi dari kehadiran sekolah di Papua adalah kehadiran asrama. Asrama dibangun sebagai salah satu sarana untuk memudahkan orang Papua yang datang dari berbagai etnis dan geografis untuk memperoleh pendidikan. Melalui asrama inilah terjadi pertemuan berbagai orang muda secara periodik baik yang dari daerah pantai, pedalaman atau pun daerah perkotaan dan perkampungan, semakin memperkuat kepapuaan.

Ide kepapuaan yang telah disemai ini terus bertumbuh ketika J.P.K. van Eechoud ditunjuk sebagai pejabat residen di Papua pada 1945. Sebelum menjabat residen, Van Eechoud memprakarsai pembukaan kursus dengan pola asrama khusus untuk para putra Irian. Kursus ini meliputi bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian, militer dan pendidikan. Pertumbuhan kepapuaan semakin menguat pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) ketika masalah Papua menjadi masalah nasional dan internasional. Akibatnya kepapuaan semakin terlembaga ketika pertama kali dimunculkannya ide Papuanisasi dalam partai politik. Partai politik yang dimaksudkan adalah partai politik pertama orang Papua yaitu Partai Nasional (Parna) pada 1960. Parna dan peran media massa seperti radio dan surat kabar memperkuat bertumbuh dan berkembangnya nasionalisme Papua hingga pada peristiwa 1 Desember 1961 merupakan hari pengakuan sebagai bangsa Papua.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menguatnya Nasionalisme Papua pada akhir 1962 karena: *pertama*, mayoritas penduduk Papua beragama Nasrani. *Kedua*, penggunaan bahasa Melayu di berbagai lapisan masyarakat. *Ketiga*, terbentuknya Dewan Nieuw Guinea yang mewakili berbagai suku dan agama. *Keempat*, munculnya media massa berupa surat kabar dan radio. *Kelima*, munculnya kaum intelek dan elite di perkotaan khususnya di Hollandia (Jayapura sekarang) dan Manokwary

Sementara, kesadaran keindonesiaan di Papua baru disemai pada 1945 ketika hadirnya Soegoro Atmoprasodjo, kemudian disusul oleh J. Gerungan dan G.S.S.J. Ratulangi 1946, Stefanus Joseph dan Petero Jandi 1948. Sasarannya mengindonesiakan orang Papua mengacu padaproklamasi 17 Agustus 1945. Para penggagas awal nasionalisme Indonesia berasal dari luar Papua yang tidak dipersiapkan untuk mengindonesiakan orang Papua. Proses membangun keindonesiaan di Papua pun berlangsung sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal, perencanaan yang matang dan menggunakan pola asrama. Upaya yang dilakukan umumnya adalah secepat mungkin menyebarkan nasionalisme Indonesia melalui himbauan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik. Soegoro misalnya membentuk kelompok belajar di kursus Pamong Praja di kota Nica untuk menyampaikan ide keindonesiaan sementara Gerungan menggunakan waktu luangnya sebagai seorang dokter di rumah sakit pemerintah di Jayapura

⁵ Mansinam merupakan salah satu pulau kecil terletak di Manokwari yang merupakan pusat pertama kedatangan penginjil asal Jerman 1855 Ottow dan Geissler pada 1855. Mie saat ini merupakan salah distrik di kabupaten Teluk Wondama yang pada tahun 1925 menjadi tempat pertama pendidikan modern khusus bagi anak-anak lelaki Papua.

untuk mempengaruhi orang Papua agar mendukung Indonesia dengan dibentuknya Komite Indonesia Merdeka (KIM). Begitupun dengan Ratulangi yang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Serui, berusaha menyampaikan ide keindonesiaan kepada orang Papua di Serui dengan cara himbauan, rapat dan membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII).

Proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan tanpa melalui pendidikan formal dengan pola asrama yang baik. Proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui gerakan bawah tanah karena sejak 1945 hingga 1962 Papua masih dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar menyangkut pengalaman masa penjajahan Belanda antara Papua dan daerah lain di Indonesia. Proses mengindonesiakan orang Papua selama 17 tahun sejak 1945 hingga 1962 dapat dianggap belum selesai bahkan masih dalam tahap penyemaian belum pada tahap pertumbuhan apalagi bila dikaitkan proses penyemaian yang belum merata di seluruh wilayah Papua. Sejak 1945-1962, sebagian besar masyarakat di Papua termasuk pegunungan tengah belum tersentuh bibit-bibit keindonesiaan.

Lemahnya nasionalisme Indonesia hingga 1962 disebabkan karena: *pertama*, prosesnya instan, tidak terencana (tidak dipersiapkan), tanpa proses pendidikan, hanya melalui rapat/himbauan dan pembentukan partai politik. *Kedua*, ketika para penggagas Indonesia asal Indonesia ditangkap dan dikembalikan ke luar Papua maka pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang masih dalam tahap mendalami keindonesiaan. *Ketiga*, penggunaan bahasa Melayu sejak kehadiran gereja dan pemerintah di Papua ternyata bukanlah merupakan bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan di Papua. *Keempat*, proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui gerakan bawah tanah, karena sejak 1945 hingga 1962 Papua masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Nasionalisme Papua dan Indonesia sebelum dan sesudah Orde baru

Walaupun Trikora berhasil membangun semangat menggelora dari rakyat di seluruh Indonesia termasuk di Papua⁶ untuk melawan penjajah Belanda di Papua melalui perundingan New York 15 Agustus 1962 dan integrasi Papua ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963, kesadaran kepapuaan tidak semakin punah/ lemah.

Sementara menurut Djopari(1993) sejak 1962, berbagai demonstrasi pro Indonesia di beberapa daerah di Papua menuntut *pertama* perpendekan masa pemerintahan UNTEA, *ke dua*, menuntut menggabungkan dengan Indonesia, *ke tiga*, menyatakan setia pada proklamasi 1945 *ke empat*, menghendaki wilayah kesatuan dari Sabang sampai Merauke, *ke lima* menuntut otonomi khusus yang seluas-luasnya dalam wilayah Indonesia di Irian Barat seperti: Kota Baru, Ransiki, Manokwari, Enarotali, Kokonao, Merauke dan Biak. Pernyataan –pernyataan rakyat pada 1962 terdapat 21 pernyataan, 1963 menjadi 25 pernyataan, 1964 hanya 7 pernyataan, 1965 berkurang menjadi 4 pernyataan, 1968 hanya 3 pernyataan, 1967 meningkat 23 pernyataan dan di 1968 menjadi 35 pernyataan

Menurut Drooglever, tidak semua pernyataan itu berasal dari kemauan masyarakat Papua itu sendiri melainkan mereka ditekan. Drooglever(2010) menjelaskan;

Berita datang dari dewan daerah Biak-Numfor dan muncul dalam bentuk satu oermihinan kepada sekjen PBB. Pernyataan ditandatangani oleh letua dewan, Arnold Mampioper dan beberapa orang lain. Bersama –sama mereka mewakili, menurut kata –kata mereka sendiri, empat puluh ribu

⁶ Lihat berbagai surat kabar lokal maupun nasional menjelang Peristiwa Trikora 1961.

penduduk pulau-pulau. Didalam dokumen itu ditegaskan bahwa delegasi Dewan Papua oleh Soebandrio sangat ditekan untuk menandatangani perntaan ternaksud. Pada pertemuan di Jakarta, Soebandrio menunjukkan kepada mereka tanpa basabasi kekuatan militer Indoensia yang lebih besar, dan menambahkan ke situ bahwa ia akan mengusir UNTEA dari wilayah ini kalau perlu dengan kekuatan senjata.

Sebelum Orde baru, dalam berbagai laporan menyangkut integrasi dan Pepera di Papua cenderung memperlihatkan bahwa fokus pembangunan di Papua pada ideologi dan politik dengan sasaran menanamkan pancasila dan nasionalisme Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa selama ini pemerintah Belanda telah membentuk elit Papua yang nasionalis Papua. Dengan demikian, pemerintah mencoba melibatkan kelompok nasionalis Papua ke dalam jabatan pemerintahan dan badan perwakilan daerah (Djopari, 1993).

Di bagian lain dari laporan-aporan tersebut juga memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sebelum Orde baru menurut Djopari adalah menggunakan pendekatan militer dan kesejahteraan sejak awal integrasi 1963 -1984 dalam bentuk intensitas yang berbeda. Peningkatan tugas intelijen, pelaksanaan Operasi sadar, gabungan ketiga angkatan dan operasi sadar. Sebelum dilakukan pengamanan, dikumpulkan kepala suku dan dimintai pendapat dan saran dan sekaligus diberikan penerangan untuk menyiapkan pasukan yang kemudian diadakan penangkapan dan penyusupan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam Organisasi papua Merdeka(OPM).

Djopari(1993) menjelaskan bahwa operasi sadar dipusat di Manokwari dianggap cukup berhasil dan pada 1967 berhasil membunuh antara lain Wambrauw, Salosa, Meitdoga dan Irogi. Pada jaman Sarwoedhi ada ajakan kembali ke kampung, lewat penyebaran pamflet 1-39 Nopember 1968. Akhirnya, Barrend Mandatjan dan dan lodewijk Mandatjan bersama 595 pasukan dan 106 pucuk senjata dan 3.835 rakyat suku Arfak kembali ke kampung. Sementara Operasi wibawa dengan cara meningkatkan kewibawaan ABRI dan pemerintah. Begitupun pada 1969 kembali pecah peristiwa di Enarotali namun dengan pendekatan misi keagamaan berhasil dipadamkan. Pada 1969 PEPERA sukses membawa Papua kembali ke NKRI. Sesudah Pepera, Acup Zainal sebagai panglima perintahkan operasi memusnahkan gerombolan di Biak kemudian pada jaman Panglima Sembiring menggunakan pendekatan keagamaan serta dilaksanakan kegiatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan.

Dari berbagai pendekatan yang dilakukan selama itu (sejak awal integrasi hingga 1970) lebih banyak menimbulkan polemik karena menurut Djopari (1993) selama Belanda di Papua, rakyat tidak merasa ditindas sementara petugas yang ditugaskan di Papua pada masa itu mengambil paksa barang peninggalan Belanda di Papua. Korupsi, memperkosa wanita dan memberi kata-kata senonoh, generalisasi bahwa orang Papua suka mabuk karena ditinggal kebiasaan Belanda. Pernyataan dan sikap-sikap ini membuat OPM tambah subur dan tentu memperkuat keapuaan.

Dengan berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini militer terhadap masyarakat yang dianggap tidak nasionalis Indonesia, langsung ditindak tanpa memahami bagaimana orang Papua pada masa itu mengetahui dan memahami proses integrasi apalagi menyangkut kesadaran keindonesiaan. Di satu pihak tindakan membasmi gerakan anti Indonesia dapat dianggap benar mengingat Papua adalah bagian dari NKRI sementara di pihak lain pendekatan yang lebih militerisme justru memperkuat kesadaran keapuaan.

Bila ditinjau dari aspek geografis Papua, proses penyemaian mengindonesiakan orang Papua selama periode 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebagian masih dalam tahap penyemaian dan belum ke tahap pertumbuhan belum pada tahap perkembangan. Proses

penyemaian dan pertumbuhan pun belum menjangkau seluruh daerah di Papua. Sementara pasca integrasi 1963 di Papua, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang belum nasionalis termasuk daerah pedalaman sebagai daerah sasaran operasi militer. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa operasi militer yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu di seluruh Papua pasca 1963, dapat dikatakan bertentangan dengan proses keindonesiaan yang masih dalam tahap penyemaian. Tindakan pemerintah dalam mengindonesiakan orang Papua pasca 1963 dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Bila pernyataan ini benar, tidaklah mengherankan apabila Margaretha Hanita yang dalam disertasinya masih mempertanyakan apakah status keanggotaan Papua dalam negara multi bangsa Indonesia merupakan penyerahan sukarela atau secara sengaja bergabung dengan Indonesia untuk kepentingan berbangsa. Margaretha Hanita juga menjelaskan bahwa secara historis Papua menjadi bagian negara multi bangsa Indonesia dengan secara tidak sukarela melalui penyerahan suatu kekuasaan lainnya, yakni dari penjajahan Belanda ke Indonesia (2010). Begitupun dengan Ikrar Nusa Bakti yang mengakui bahwa sejarah masuknya Papua ke Indonesia bukanlah sederhana melainkan melalui jalan panjang yang rumit. Indonesia bukan saja menggunakan cara-cara diplomatik tetapi juga melalui cara-cara militer (dalam Safroedin Bahar, A.B.Tangdililing, 1996). Pandangan Ikrar ini memperlihatkan bahwa keinginan bergabungnya orang Papua ke NKRI bukanlah didasarkan oleh keinginan mereka semata-mata melainkan adanya tuntutan pemerintah Indonesia baik melalui diplomasi maupun militer. Kemudian Chauvel(2005) dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme Papua lebih kuat dewasa ini daripada 1961 dan identitas sebagai orang Papua lebih kuat di tahun 2004 daripada 1963.

Kondisi yang digambarkan Margaretha, Ikrar Nusabakti dan Chauvel di atas ini menunjukkan bahwa selama masih menguatnya nasionalisme Papua di antara orang Papua dan memperlihatkan lemahnya keindonesiaan di Papua selama ini harus didukung dengan pengertian dan logika yang memadai. Matindas(2010) dalam bukunya mengulas “Negara Sebenarnya” menjelaskan bahwa paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan yang penting dirasakan sebagai api emosi yang besar membakar semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat berfungsi sebenar-benarnya. Nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran.

Kesimpulan

Mengakhiri tulisan ini barangkali, masyarakat Indonesia termasuk di Papua di masa kini perlu menyadari bahwa konsep “negara-bangsa” yang dipromosikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sebagai bangsa yang besar bukanlah semata-mata didasarkan atas kesamaan etnis, budaya, agama dan memiliki pengalaman serta keinginan yang sama melainkan negara-bangsa ini dibangun atas proyek politik atau diciptakan dan ditemukan. Maka pemikiran Matindas yang menyatakan bahwa pentingnya memahami nasionalisme di atas perlu dipertimbangkan untuk mengkaji masalah keindonesiaan di Papua. Mengingat Nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran.

Memang masyarakat di setiap wilayah Indonesia memiliki kesadaran kedaerahan/lokal/etnis di samping kesadaran keindonesiaan, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Papua. Perjalanan dua nasionalisme di Papua mengkisahkan makna yang berbeda dan mempunyai sejarah yang panjang. Dengan demikian, masih adanya berbagai pertanyaan yang mempersoalkan nasionalisme Indonesia di antara orang Papua hingga pasca Orde baru bahkan mungkin di era otonomi khusus ini membuktikan bahwa mungkinkah berbagai pendekatan (militer, ekonomi, sisoal budaya) yang digunakan pemerintah selama itu belum dapat

meningkatkan nasionalisme Indonesia. Apakah masih diperlukan pendekatan lain seperti pendekatan sejarah untuk membangun keindonesiaan di Papua?

Daftar Pustaka

Surat Kabar/Majalah/Jurnal/Internet

Bina Darma. No.44 tahun ke 12, 1994.

Tabloid Fajar Timur, Edisi III/Tahun 1/23-31 Agustus 2009

Buku

Bambang Purwanto. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris?!*, Yogyakarta: Ombak.

Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption*, East-West center, Washington.

Djopari, John. R.G.(1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta PT. Gramedia.

Drooglever Pieter, J.(2009). *An Act of Free Choice Decolonization and the Right to Self Determination in West Papua*. Terj. Theresa Stantin, Maria van Yperen dan Marjolijn de Jager. England.

Elson, R.E. (2009). *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*.Serambi: Jakarta.

Hanita Margaretha. (2010). *Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Gerakan Koreroi dan Hai Papua*, *Disertasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta,

Lanur Aleks, ed. (1995). *Pancasila Sebagai Ideologi terbuka, Problema dan Tantangannya*, Kanisius Yogyakarta.

Meteray, Bernarda, (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Kompas, Jakarta.

Matindas E. B, (2005). *Negara Sebenarnya*, Widyaparamitha, Jakarta.

Soewarsono, ed. (2007). *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. LIPI: Jakarta.

Safroedin, Tandililing AB Bahar,(1996). *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suryadinata Leo, ed,(2004). *Ethnis Relations and Nation Building in Southeastasia*, Nias Press, Singapore.